

Perspektif Media Massa Terhadap Politisi Perempuan Dalam Tiap Rezim Negara Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Lutfi Basit, Syukur Kholil, Hasan Sazali

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

lutfibasit@umsu.ac.id
syukurkholil@uinsu.ac.id
hasansazali@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tampilan politisi perempuan dalam perspektif media massa, juga menganalisa perbedaan peliputan media massa terhadap politisi perempuan dalam perspektif *gender* di negara *full democracy*, *flawed democracy*, *hybrid regime*, dan *authoritarian regime*. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini didesain menggunakan Meta Analisis Kualitatif dengan pendekatan konstruktivis-interpretif. Data penelitian divalidasi dengan triangulasi data/ sumber dan dianalisis dengan tiga pendekatan yang ada di dalam konsep meta-etnografi. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan *proses preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses* (PRISMA) dari tiga platform pencarian, yaitu *Google Scholar*, *Science Direct* dan Perpustakaan digital Perpustakaan RI. Penelitian ini menemukan bahwa media massa tradisional dan online menampilkan politisi perempuan dalam perspektif *gender* yang negatif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dikategorikan dalam objektifikasi, stereotip dan patriarki. Politisi perempuan juga dilemahkan oleh media massa dalam liputannya dengan kombinasi isu *gender* dan isu ras secara simultan. Potret politisi perempuan di negara *full democracy*, *flawed democracy*, *hybrid regime*, dan *authoritarian regime* ditampilkan media massa dalam perspektif yang dominan negatif, dimana di negara *full democracy* dan *flawed democracy* dengan persentase negatif yang lebih rendah dibandingkan di negara *hybrid regime* dan *authoritarian regime*.

Kata kunci: perspektif, media massa, politisi perempuan

A. PENDAHULUAN

Setiap diskursus yang berkaitan tentang perempuan, selalu memunculkan isu persamaan atau kesetaraan *gender*. Isu kesetaraan *gender* ini menggema baik di negara-negara maju yang sudah mapan secara demokrasi, maupun di negara berkembang yang belum mapan secara demokrasi. Dalam menanggapi isu tersebut, maka dilaksanakan Konferensi Dunia tentang Perempuan yang dilaksanakan di Beijing tahun 1995, dengan terlaksananya konferensi tersebut maka timbul hasil yang dikenal sebagai *Beijing Platform for Action*.

Melalui hasil tersebut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan poin-poin yang menjadi alasan tentang urgensi keterkaitan perempuan dalam ranah politik, yaitu: keadilan; pengalaman; ketertarikan; massa yang kritis; simbolis; dan demokrasi. Hasil kajian PBB mengungkapkan bahwa representasi perempuan harus mencapai minimal 30% dalam parlemen untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

Dalam penelitian yang dilakukan Kumar tentang representasi perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2017 representasi perempuan dalam parlemen di dunia hanya ada 23,4%. Dalam beberapa negara memiliki representasi perempuan yang sangat tinggi, tetapi di beberapa negara lainnya masih sangat rendah. Negara-negara Eropa, sebagai negara yang mempromosikan keterlibatan *gender* di ranah politik, sampai saat ini masih belum merata terkait representasi perempuan. Beberapa negara mencapai level tinggi, seperti Finlandia (76,9%) atau Kroasia dan Irlandia (keduanya berada pada posisi 54,5%). Namun beberapa negara anggota lainnya masih rendah seperti Estonia dan Siprus (keduanya pada posisi 16,7%) dan Bulgaria (17,6%). Menurut Kumar di sebagian negara-negara Asia representasi perempuan dalam parlemen sangat rendah, seperti Benin (7,2%), Maladewa (5,9%), Sri Lanka (5,8%), Nigeria (5,7%), Thailand (4,8%), Kuwait (3,1%), Lebanon (3,1%), Haiti (2,7%), Yaman (0,51%), dan Qatar (0 %). Di Indonesia, representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 sebanyak 117 (20,3%) dari total anggota DPR 575 orang (Pankaj, 2017).

Sebagai respon terhadap representasi perempuan tersebut, dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen. Sejumlah norma dan standar telah disepakati secara internasional untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik. Di antara yang paling menonjol adalah Resolusi Majelis Umum PBB 2011 tentang partisipasi politik perempuan (A/RES/66/130) yang menekankan kepentingannya yang kritis dalam semua konteks. Resolusi ini menyerukan negara-negara Anggota PBB untuk

mengambil berbagai langkah dalam meningkatkan kesetaraan *gender* bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam semua aspek, termasuk dalam berpolitik.

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Sosok ideal, perempuan muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan superpower (Rustan Efendy, 2014). Dalam nilai-nilai dasar Islam sendiri menempatkan perempuan dan laki-laki setara, keduanya memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan (Nurul Chuirun Nisa, 2019).

European Institute for Gender Equality (EIGE), komite ahli yang memberikan saran tentang kebijakan kesetaraan *gender* di tingkat *European Union* (UE), *European Women's Lobby* (EWL), Dewan Majelis Parlemen Eropa, dan penelitian untuk Parlemen Eropa mempromosikan pendekatan holistik dan telah mengidentifikasi sejumlah praktik yang baik dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh legislator, pemerintah, parlemen, partai politik dan masyarakat sipil untuk meningkatkan keseimbangan *gender* dalam perwakilan politik.

Hal ini berkisar dari langkah-langkah keras seperti mengubah sistem pemilihan dan membutuhkan kuota *gender* yang disahkan, hingga langkah-langkah lunak seperti memperkenalkan kuota perempuan di partai secara sukarela dan memberikan pelatihan, pendampingan dan dukungan bagi kandidat perempuan. Dorongan dan stimulus yang dilakukan secara global dan nasional tersebut telah mampu mengubah proporsi perempuan di parlemen secara global meskipun tidak merata, baik di negara yang *full democracy* (demokrasi penuh), *flawed democracy* (demokrasi yang cacat), (demokrasi yang cacat), *hybrid regime* (rezim hibrid) dan *authoritarian regime* (rezim otoriter).

Representasi perempuan dalam parlemen dunia, dibandingkan tahun 2017 yang menurut hasil penelitian Kumar sebesar 23,3%, mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 25%. Di negara-negara Eropa, representasi perempuan, mengalami peningkatan yang stabil, seperti terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Perkembangan Proporsi Wanita di Parlemen Eropa

Tahun	Persen
1979-1984	15,2
1984-1989	15,7
1989-1994	19,9
1994-1999	27,4
1999-2004	27,5
2004-2009	29,9
2009-2014	35,5
2014-2019	36,4

Sumber: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/>

Perkembangan representasi politisi perempuan di parlemen juga terjadi di negara-negara Asia, seperti terlihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Representasi Perempuan dalam Parlemen di Asia

Negara	1990	2017
Filipina	9	30
Nepal	6	30
Laos	6	28
Vietnam	18	27
Cina	21	24
Singapura	5	23
Pakistan	10	21
Indonesia	12	20
Bangladesh	10	20
Kamboja	0	20
Mongolia	25	17
Korea Selatan	2	17
India	5	12
Malaysia	5	10
Jepang	1	9
Brunai	0	9
Sri Lanka	5	6
Thailand	3	3

Sumber: <https://www.nationthailand.com/breakingnews/30359282>

Perempuan menjadi wacana yang menarik dalam konteks ajaran Islam. Sehingga tidak heran di dalam Al-Qur'an perempuan mendapatkan perhatian yang istimewa, bahkan diabadikan secara khusus menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Qur'an (Zainal Abidin, 2015). Ada berbagai macam argumen untuk keseimbangan *gender* dalam politik, dan menguntungkan tidak hanya perempuan dan politisi perempuan, tetapi juga partai itu sendiri dan seluruh masyarakat. Bagaimanapun, perempuan membentuk separuh populasi dan perlu

lebih terwakili dalam struktur kekuasaan. Namun, ada bukti kuat tentang hambatan dan strategi yang efektif dalam hal meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan, yaitu: faktor sistem; dan faktor budaya. Dalam hal ini faktor budaya merupakan faktor utama yang menjadi kendala kultural keterlibatan perempuan dalam politik. Salah satu yang menyebabkan kontruksi sosial yang timpang terhadap kaum perempuan adalah pemahaman yang salah terhadap *gender*. Secara kondrati, kondisi fisik dan tubuh perempuan memang lemah dibandingkan dengan laki-laki, mereka setiap bulan terkena haid, belum lagi ketika mengandung, melahirkan dan menyusui. Namun sebenarnya kondisi itu bukanlah halangan bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam ranah publi, termasuk ikut serta dalam struktur kenegaraan (Arifatul, 2007).

Pengarusutamaan *gender* menjadi penting dan harus muncul dalam proses tata kelola kebijakan nasional maupun internasional untuk membebaskan perempuan dari apa yang disebut oleh Gaye Tuchman dengan teori *symbolic innihilation* (pemusnahan simbolik), yang terjadi melalui pembungkaman suara perempuan dan tidak adanya perempuan dari kehidupan publik serta penindasan mereka di ruang privat. Istilah pemusnahan simbolis digunakan oleh Tuchman untuk menggambarkan cara media massa mengabaikan perempuan sebagai subjek dan sumber berita, dan merendahkan atau meremehkan kontribusi politik mereka melalui trivialisasi dan penghukuman. dalam pandangan Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan secara individual adalah sama, keduanya berhak melakukan perbuatan kebaikan dan atas kebaikan itu pula akan dinilai sebagai hasil akhir (Sugiri Parman, 2018). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing akan mendapat-kan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya (Mohammad Muchlis Solichin, 2006).

Media memiliki peran yang unik dan penting dalam mengkonstruksi pandangan masyarakat terkait peran laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat menikmati hak yang sama. McNair menyatakan bahwa media massa dalam realitas politik dapat mengambil tiga peran, yaitu: sebagai *intensifier*, yang mampu untuk memunculkan isu dan mempertajamnya; sebagai *conflict diminisher*, media mampu menenggelamkan suatu isu; dan sebagai *conflict resolution*, media mampu menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif (Susan dan Judy, 2002).

Dengan kemampuan yang besar, media memiliki potensi dalam memberikan dampak terhadap pembentukan dan terjadinya evolusi norma sosial dan budaya, termasuk menghubungkan norma sosial dan budaya tersebut dengan perempuan. Namun peran media tersebut dalam menengahi permasalahan tersebut dapat dikatakan belum maksimal. Tidak

maksimalnya peran media tersebut sangat mungkin berkaitan dengan jumlah dan komposisi perempuan dalam industri media. Menurut Luviana jumlah jurnalis perempuan di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan jurnalis laki-laki, yaitu hanya sekitar 1:3 atau 1:4 di Indonesia. Sekitar 56,5% jurnalis berstatus sebagai karyawan tetap sedangkan selebihnya berstatus kontrak atau *freelance*. Walaupun mereka telah mendapatkan pelatihan *gender*. Data juga menunjukkan hanya sekitar 33% jurnalis perempuan yang masuk dalam organisasi wartawan, dan hanya 6% jurnalis perempuan yang menduduki posisi sebagai redaktur maupun pengambil keputusan dalam redaksi (Luviana, 2012).

Uraian di atas memberikan gambaran permasalahan diskriminasi terhadap politisi perempuan. Diskriminasi ini juga terjadi pada prinsip pers dan kaidah jurnalistik yang bebas, berimbang dan objektif dengan kenyataan bahwa masih terjadi ketimpangan pers dalam pemberitaan media massa berdasarkan kepada *gender*, media massa masih menampilkan wajah yang diskriminatif ketika memberitakan politisi laki-laki dan politisi perempuan. Problema terhadap diskriminasi tersebut, membuat PBB turun tangan dalam mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan peran sosial perempuan dalam ruang publik, termasuk juga dalam ranah politik. Dengan turunnya PBB akan kegiatan anti diskriminasi tersebut, seharusnya dapat membuat media massa dapat mengambil bagian dalam kegiatan anti diskriminasi. Faktanya, media massa hidup di negara dengan tipe rezim yang berbeda-beda sehingga menciptakan beragam indeks kebebasan media, bahkan media massa juga hidup dalam sebuah negara dengan religiusitas penduduk yang juga berbeda, dimana religiusitas tersebut dapat mempengaruhi regulasi negara, termasuk di dalamnya adalah pers.

Permasalahan ini yang membuat peneliti sadar akan urgensi tentang bagaimana media massa menilai politisi perempuan melalui sudut pandang mereka. Sehingga membuat peneliti memutuskan untuk mengambil tema penelitian ini, yang bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana perspektif media massa dalam menilai partisipasi perempuan dalam ranah politik di berbagai negara berdasarkan tipe rezimnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Feminisme dalam Komunikasi

Teori feminisme dalam bidang komunikasi mencakup banyak hal tetapi lebih banyak pada kajian dan penjelasan *gender* serta kekuatan *gender* dalam teks-teks komunikatif. Dow dan Condit menegaskan bahwa untuk dianggap feminisme, teori atau keilmuan lainnya harus difokuskan untuk memberikan kontribusi pada tujuan keadilan yang lebih besar dalam kaitannya dengan gender (Dow dan Condit, 2005). Teori feminisme dalam komunikasi harus

memperhitungkan tidak hanya interaksi gender dan kekuasaan, tetapi juga relevansi elemen tekstual lainnya termasuk ras, seksualitas dan kelas. Ketidakseimbangan kekuasaan *gender* dipahami sebagai persilangan dengan relasi kekuasaan kelas, ras, seksualitas dan kategori lainnya termasuk agama dan etnis. Teori komunikasi feminisme yang canggih harus berusaha mempertimbangkan berbagai elemen ini (Lisa, 2016). Mengomentari surat Al-Hujurat ayat 13 Sarifa Suhra (2013) mengungkapkan, bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan diamanatkan menjadi pemimpin, lebih lanjut ia mengungkapkan, Ayat ini juga mempertegas misi pokok Al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya (Sarifa Suhra, 2013).

2. *Post-Feminism*

Para ahli teori komunikasi feminisme memfokuskan banyak perhatian pada penyebaran *post-feminism* di media arus utama selama tiga dekade terakhir. *Post-feminism* bukanlah tahap aktivisme feminisme akan tetapi terbentuknya konstruksi media. Fungsinya yang paling mendasar adalah untuk menegaskan secara definitif bahwa feminisme tidak ada lagi. Namun, istilah tersebut dapat digunakan dengan konotasi yang relatif positif atau negatif mulai dari gagasan bahwa feminisme tidak lagi diperlukan karena semua tujuannya telah tercapai, hingga gagasan bahwa feminisme adalah kegagalan besar yang tidak membantu perempuan tetapi malah membuat mereka sangat tidak senang dan tidak puas (Susan: 1991).

3. *Gender dalam Konsep Barat*

Menurut Anderson *gender* merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. *Gender* membedakan struktur setiap aspek kehidupan sosial manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin (Ursula, 2013). Sebagai konsep dalam analisis sosial, *gender* mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai bentukan budaya (Julia, 1996), demikian pula yang di ungkapkan Muqoyyidin (2013) dalam kutipannya di Jurnal Al-Ulum. Masyarakat menciptakan sikap dan perilaku berdasarkan jenis kelamin termasuk menentukan apa yang seharusnya membedakan perempuan dan laki-laki. Keyakinan tersebut diwariskan secara turun temurun melalui proses sosialisasi, baik dalam keluarga, masyarakat, lembaga, pendidikan maupun agama (Ema, 2011).

4. *Gender dalam Konsep Islam*

Feminisme Islam menurut Margot Badran mulai muncul atau baru diidentifikasi oleh akademisi Barat pada tahun 1990-an. Feminisme Islam memiliki pandangan berbeda terhadap emansipasi wanita. Dalam definisi yang diterima secara luas oleh Margot Badran,

feminisme Islam adalah wacana dan praktik feminis yang diartikulasikan dalam paradigma Islam. Feminisme Islam memperoleh pemahaman dan mandatnya dari Alquran, mencari hak dan keadilan bagi perempuan, dan bagi laki-laki, dalam totalitas keberadaan mereka. Ini berbeda dalam beberapa hal dari feminisme sekuler, yaitu merupakan gerakan sosial yang disertai dengan teks-teks feminis akademik, feminisme Islam pada awalnya merupakan upaya intelektual. Itu adalah wacana baru, modernis yang berusaha untuk meletakkan kesetaraan *gender* dalam sumber agama, yaitu Alquran (Margot, 2009). Mengomentari surat al-isra' ayat 70 Rusydiyah (2016) mengungkapkan, Ayat tersebut menjelaskan bahwa kata bani (anak-anak) Adam mencakup pria dan wanita, keduanya sama-sama dimulyakan tanpa ada perbedaan jenis kelamin; keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajibannya (Evi Fatimatur Rusydiyah, 2016).

5. *Stereotype Gender Politik*

Huddy dan Terkildsen mendefinisikan stereotip gender politik sebagai penganggapan berbasis gender dari sifat, perilaku atau keyakinan politik yang berbeda untuk politisi pria dan perempuan. Meskipun banyak stereotip gender mencerminkan keyakinan tentang tipikal pria dan perempuan dalam masyarakat, yang lain muncul dari ranah politik. Dengan demikian, stereotip gender politik dapat mewakili subtype stereotip gender yang berbeda (Leonie dan Nayda, 1993).

Penelitian-penelitian yang membahas persimpangan stereotip partisan dengan stereotip *gender* masih sangat terbatas, namun studi-studi telah dilakukan untuk mengungkapkan peran penting stereotip gender. Investigasi eksperimental King dan Matland tentang sikap kandidat Partai Republik mengungkapkan bahwa kandidat perempuan Republik dapat dibantu oleh stereotip *gender* di antara pemilih Demokrat dan independen, yang melihat kandidat perempuan Republik lebih moderat daripada pria Republik. Namun, pada saat yang sama pemilih Partai Republik lebih cenderung memilih kandidat perempuan Republik karena alasan yang sama, pemilih partai Republik cenderung memilih kandidat perempuan Republik karena alasan yang sama, mereka menanggapi perempuan Republik lebih moderat dibanding laki-laki Republik. Penelitian lain telah mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemikiran stereotip tentang kandidat perempuan meningkatkan jarak ideologis yang dirasakan antara kandidat perempuan Demokrat dan pemilih, dengan konsekuensi untuk dukungan suara (David dan Richard, 2003).

6. *Konstruksi Media Massa*

Media sebagai institusi sosial tidak lepas dari tanggung jawab sosial untuk berperan aktif memberikan informasi yang factual, komprehensif, dan proposional. Peran yang harus

dimainkan oleh media ini disadari sepenuhnya para awak pers. Media memiliki kemampuan untuk membangun citra, melakukan penggalangan opini publik, kampanye, sosialisasi politik, hingga memainkan isu-isu tertentu baik negatif maupun positif. Hal ini dikarenakan media massa dan pers bukan hanya sekedar bagian integral dari politik, lebih dari itu ia telah bertransformasi menjadi salah satu bagian dalam politik itu sendiri, yang mampu menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi untuk kemudian mengkonstruksinya menjadi wacana umum untuk dikonsumsi masyarakat (Syukur dan Maulana, 2015).

Dalam kaitannya dengan media massa dan berita, kaum konstruksionis memandang bahwa realitas yang ada di media massa yakni berita bukanlah realitas yang objektif, melainkan sebagai realitas yang telah dikonstruksi oleh pembuatnya, yakni wartawan/media itu sendiri. Hal ini berbeda dengan pandangan positivis yang memahami bahwa realitas yang ada di media itu bersifat objektif. Selain plural, realitas (sebagai produk konstruksi) juga bersifat dinamis.

Dalam konteks berita yang disampaikan oleh media massa, berita dalam media massa tidak bisa disamakan dengan fotokopi dari realitas, tetapi harus dipandang sebagai hasil konstruksi dari realitas. Karena itu, peristiwa yang sama berpotensi dikonstruksi secara berbeda oleh beberapa media massa. Wartawan atau jurnalis bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa atau kejadian, yang terwujud dalam teks berita. Realitas bukan dioper begitu saja menjadi berita. Realitas adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Dalam proses internalisasi, realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memahami realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Dengan demikian, teks berita yang dibaca di surat kabar atau didengar di televisi atau radio adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut.

Pandangan kaum konstruksionis terhadap media, wartawan, dan berita, secara jelas terlihat seperti yang dipaparkan Eriyanto, yakni : fakta adalah hasil konstruksi; media adalah agen konstruksi; berita bukan refleksi; berita bersifat subjektif; wartawan bukan pelapor; etika wartawan merupakan bagian integral dalam memproduksi berita; etika wartawan merupakan bagian integral dalam penelitian; dan penafsiran akan berita (Deddy dan Eriyanto, 2002).

C. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang peneliti hendak investigasi dan analisis terkait:

1. Bagaimana media massa menampilkan politisi perempuan dalam liputan atau laporannya dalam perspektif *gender*?
2. Bagaimana perbedaan peliputan media massa tentang politisi perempuan dalam perspektif *gender* di negara *full democracy*, *flawed democracy*, *hybrid regime*, dan *authoritarian regime*.

Penelitian ini menggunakan desain Meta Analisis Kualitatif dengan pendekatan konstruktivis-interpretif yang bertujuan untuk menafsirkan studi asli dan menawarkan perspektif menyeluruh atau tertentu yang menyakikan konseptualisasi. Dalam penggunaan Meta Analisis Kualitatif terdapat lima tahapan proses, yaitu: menetapkan pertanyaan penelitian; menyusun protokol data penelitian; menyusun strategi pencarian; melakukan ekstraksi data penelitian dan menggunakan meta analisis.

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pencarian data yang sesuai dengan kriteria melalui tiga *platform* pencarian *online*, yaitu *Google Scholar*, *Science Direct* dan Perpustakaan Digital Perpustakaan RI. Untuk memperoleh hasil pencarian yang lebih spesifik sehingga hasil pencarian lebih sesuai dengan data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan beberapa kata kunci, yaitu *Women Politician and Mass Media Coverage* dan *Women Politicians and Gender Lens Coverage*. Setelah data penelitian yang diperoleh maka data penelitian tersebut dipilih yang relevan melalui prosedur *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA).

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analitis yang fleksibel, yang didasarkan pada perbandingan, abstraksi, pengamatan persamaan dan perbedaan antara studi asli, sambil mencoba untuk mempertahankan pengaruh kontekstual dan detail dalam temuan. Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, teknik validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Terdapat empat macam teknik triangulasi yaitu teknik triangulasi data/ sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis dan triangulasi teoritis. Dalam penelitian ini untuk validitas data, peneliti menggunakan triangulasi data/ sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Gender Politisi Perempuan di Media Massa

Dalam masa kampanye, politisi perempuan tetap diberi ruang di media berita yang terbatas dan hampir tidak terlihat sebagai subjek cerita dan sebagai sumber berita. Mereka diberitakan sebagai kandidat yang tidak layak dalam media massa. Penonjolan berita secara intens terhadap politisi laki-laki merupakan cara media massa meminggirkan politisi

perempuan dengan menampilkan politisi perempuan di media massa dengan cara yang tidak sesuai dengan stereotip *gender*, seperti membingkai kandidat perempuan dengan lebih maskulin daripada pesaing laki-laki. Media massa tidak peduli akan posisi ideologis atau kebijakan mana yang dipegang dan ditekankan oleh pemimpin perempuan dalam manifesto partai, media akan tetap mengasosiasikan partainya terutama dengan masalah berbasis kasih sayang sebagai bukti penguatan stereotip *gender* tradisional. Memang media tidak selalu memberikan perhatian lebih pada tubuh perempuan daripada tubuh laki-laki yang bersaing untuk kepemimpinan partai politik nasional. Namun dalam kepemimpinan politik, dominasi maskulinitas tetap ideal dalam representasi media.

Mayoritas media massa menunjukkan bahwa dalam masa kampanye dan pemilihan, politisi perempuan diperlakukan secara timpang, akan tetapi terdapat beberapa media massa pada saat sebulan setelah hari pemilihan, jumlah berita yang tidak hanya sebanding untuk politisi pria dan perempuan yang mencalonkan diri, tetapi juga bahwa artikel-artikel itu tampak sama. Kandidat pria dan perempuan memiliki kemungkinan yang sama untuk menerima penyebutan jenis kelamin mereka dan mereka dikaitkan dengan sifat dan masalah yang sama.

2. Perspektif Gender Berdasarkan Tipe Rezim

Pada bagian ini peneliti dengan data yang sama, akan menganalisis liputan *gender* di media massa berbasis rezim pemerintahan. Jumlah media massa yang menjadi subjek penelitian tidak berada dalam tipe pemerintahan yang sama, tetapi berada dalam rezim pemerintahan yang berbeda. Tipe rezim pemerintahan tersebut di klasifikasikan dalam empat tipe rezim, yaitu: *full democracy*, *flawed democracy*; *hybrid regime* dan *authoritarian regime*.

a. Perspektif Gender di Negara *Full Democracy*

Negara *full democracy* adalah negara di mana kebebasan sipil dan kebebasan berpolitik tidak hanya dihormati, namun juga diperkuat oleh budaya politik yang kondusif dan matang sehingga prinsip-prinsip demokrasi dapat berjalan. Negara-negara ini memiliki transparansi pemerintah yang bagus dan banyak terdapat media massa yang independen.

Di Taiwan, politisi perempuan menerima liputan yang lebih sedikit, meskipun demikian baik politisi perempuan dan politisi laki-laki keduanya menerima nada laporan yang negatif dan dominan, tidak ada perbedaan gender yang khas. Namun demikian media massa memberikan perlakuan yang berbeda jika media massa

tersebut memerankan diri sebagai oposisi dari politisi perempuan tersebut dengan menekankan beberapa sifat politisi perempuan yang merendahkan.

Di United Kingdom politisi perempuan ditampilkan dalam peran gender tradisional, yaitu peran dalam rumah tangga. Peran tradisional ini digambarkan secara negatif oleh media. Politisi perempuan dipotret sebagai perwakilan dari gendernya bukan sebagai gender yang netral seperti potret yang diberikan kepada politisi laki-laki. Politisi perempuan digambarkan sebagai penurut dan membutuhkan bantuan laki-laki sehingga sering diletakkan dalam peran yang lebih kecil dan tidak dibutuhkan. Kehadiran perempuan dalam politik masih dianggap lain, kepentingan mereka tetap didefinisikan secara sempit dan homogen di sekitar pandangan patriarki tradisional tentang apa yang seharusnya diperankan oleh perempuan. Mereka kurang hadir dalam kategori tertentu, seperti politik, dan sering muncul dalam cerita nonpolitik dengan penekanan yang lebih besar pada pribadi. Model feminitas dari politisi perempuan memang dipromosikan oleh media massa, tetapi dalam waktu yang bersamaan media massa juga mempromosikan bahwa feminitas tersebut adalah kendala. Media massa di UK juga tidak bebas dari diskriminasi ras dalam liputannya, khususnya dalam pers lokal. Politisi perempuan dari kelompok minoritas dan dari kulit berwarna menerima liputan yang lebih sedikit dibandingkan kelompok yang lain. Akan tetapi beberapa media massa pada masa pemilihan umum politisi perempuan yang menjadi kandidat menerima lebih banyak liputan surat kabar daripada kandidat pria pada umumnya.

Potret politisi perempuan di media massa Kanada tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di UK, politisi perempuan kurang terwakili di media penyiaran. Kandidat perempuan menjadi sasaran penilaian yang lebih negatif terutama keterampilan komunikasi dan ketajaman politiknya. Kecerdasan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman mereka diremehkan. Mereka digambarkan sebagai korban dan akan menghadapi evaluasi berbasis gender jika kinerja mereka buruk atau tidak sesuai harapan. Media massa, tidak selalu memberikan perhatian lebih pada tubuh perempuan daripada tubuh laki-laki yang bersaing untuk kepemimpinan partai politik nasional, tetapi dominasi maskulinitas ideal dalam representasi media Kanada tentang kepemimpinan politik tetap berlangsung. Media massa di Kanada tidak terlepas dari perlakuan rasis, dimana kandidat perempuan non-kulit putih dalam pemilu, kurang menonjol. Mereka dirasiskan oleh media daripada kandidat kulit

putih lainnya dalam kontes pemilihan, meskipun perbedaan perlakuan yang berbau rasis ini dianggap tidak dilakukan secara sistematis.

Media massa Australia mengkonstruksi gender politisi perempuan dengan menonjolkan feminitas melalui. Maskulinitas masih menjadi hal yang penting bagi media massa dalam konteks politik, sehingga politisi perempuan ditampilkan dengan penampilan maskulin, mereka diberikan ruang yang lebih sedikit dan kredibilitas mereka tidak ditingkatkan semestinya.

Di Spanyol dan Austria politisi perempuan lebih mungkin dievaluasi daripada laki-laki: seperempat dari liputan yang diterima kandidat anggota parlemen perempuan dievaluasi secara eksplisit, dibandingkan dengan kurang dari seperlima cakupan kandidat laki-laki. Media massa Spanyol juga memberikan penilaian yang negatif terhadap politisi perempuan yang berada di kelompok yang berseberangan.

Negara yang menganut rezim *full democracy* lainnya masih juga terdapat perbedaan dalam liputan media massa. Di New Zealand politisi perempuan digambarkan sebagai korban cemoohan yang berbau seksualitas. Politisi perempuan ditingkatkan sebagai korban kekerasan dan pelecehan seksual yang muncul di sekitar satu dari setiap tujuh artikel. Demikian juga di Chile, media massa hanya tertarik pada citra fisik politisi perempuan. Di Swedia, politisi perempuan ditingkatkan dalam narasi yang menggambarkan mereka sebagai orang yang aneh, takut, dan tidak profesional. Di Jerman politisi laki-laki menerima lebih banyak liputan media tentang sifat kepemimpinan secara umum, meskipun stereotip pemimpin laki-laki dan perempuan menjelaskan sebagian besar variasi bias gender antara sifat kepemimpinan. Hal ini terjadi dalam suasana periode yang rutin dan bukan pada masa kampanye. Di Swiss, perhatian media massa juga bias terhadap politisi perempuan, kecuali jika mereka *incumbent*.

Namun di Denmark berita dan penggambaran fiksi dalam film dan televisi, menyediakan sarana untuk mewakili pemimpin perempuan yang memperkuat norma gender yang kuat. Banyak contoh pemimpin wanita "nyata" menunjukkan efek dari penggambaran ini pada kemampuan mereka untuk dilihat sebagai pemimpin yang sukses.

b. Perspektif Gender di Negara *Flawed Democracy*

Negara *flawed democracy* adalah negara-negara di mana pemilihannya adil dan bebas dan kebebasan sipil dasar dihormati tetapi mungkin memiliki masalah, misalnya pelanggaran kebebasan media dan penindasan kecil terhadap oposisi dan

kritikus politik. Negara-negara ini juga memiliki kesalahan signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk budaya politik yang kurang berkembang, tingkat partisipasi politik yang rendah, dan masalah dalam menjalankan pemerintahan.

United State of America (USA) merupakan negara yang masuk dalam kategori negara *flawed democracy*. Di USA, Politisi perempuan menerima liputan media yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dengan prestasi atau posisi struktural yang serupa. Kandidat perempuan menerima lebih sedikit liputan terkait masalah yang dialami politisi perempuan tersebut, tetapi hal tersebut akan lebih banyak ditampilkan media massa dan negatif jika terjadi persaingan *head to head* politisi perempuan dan politisi laki-laki. Politisi perempuan digambarkan secara negatif, seksis dan berfokus kepada peran gender tradisional mereka dalam keluarga. Meskipun politisi perempuan telah menunjukkan sosok yang kompeten, tetapi tetap saja media massa mengembalikan mereka dalam representasi emosi *gender* stereotip yang diperuntukkan terutama untuk wanita. Hal ini dialami oleh Hillary Clinton ketika memberikan pernyataannya tentang bom Benghazi di Libya yang menggambarkannya sebagai sosok yang kompeten dalam posisinya sebagai menteri luar negeri, tetapi media massa sering menggambarkannya dengan label emosional dan hilang kendali. Selain itu, kemunculan sosok perempuan di dalam politik juga sering dikaitkan dengan masalah feminim dan menggambarkannya secara simbolis di dalam berita dengan gambaran yang sepele. Meskipun begitu, kesenjangan gender yang terjadi di media massa tidak dihasilkan dari seksisme yang terang-terangan.

Liputan berbasis diskriminasi ras juga terjadi di USA, media terus mengandalkan stereotip ras dan *gender* dalam masa kampanye. Politisi perempuan kulit berwarna dan kelompok minoritas menerima cakupan lebih sedikit daripada semua kelompok lain sehingga kurang terlihat. Secara kasuistik pada negara bagian Karolina Selatan, media massa menampilkan politisi perempuan sebagai tema dari kultus wanita sejati. Hal itu terjadi karena politisi perempuan tersebut, yaitu Haley, yang merupakan gubernur perempuan pertama. Kemenangan Haley untuk yang pertama kali dirayakan sebagai pertanda perubahan moral dalam ranah politik Karolina Selatan, tetapi dalam masa jabatan keduanya politisi perempuan diposisikan dalam ruang perdebatan antara maskulinitas dan feminitas. Akan tetapi tidak ada perbedaan dalam liputan di media massa antara politisi perempuan dan politisi laki-laki, dari sisi jumlah berita maupun kualitas penggambaran mereka. Kandidat pria dan wanita

memiliki kemungkinan yang sama untuk menerima penyebutan jenis kelamin mereka dan mereka dikaitkan dengan sifat dan masalah yang sama.

Di USA, keterlibatan perempuan di dalam lembaga media secara kuantitas, baik sebagai pembuat berita maupun yang duduk di dalam dewan redaksi, memiliki peran penting bagaimana kemudian politisi perempuan digambarkan dalam laporan media massa. Di Italia, bias gender terjadi dalam bahasa pers dan politisi. Bias-bias ini sering bertemu pada kristalisasi kesenjangan gender yang menguntungkan laki-laki yang berkomitmen secara politik. Di Prancis, politisi perempuan terus menghadapi pemberitaan media yang diskriminatif dan seksis. Demikian juga di Jamaika, politisi perempuan ditampilkan dalam editorial karikatur dengan fokus pada kekurangan dalam penampilan dan karakternya. Politisi perempuan yang sedang menduduki jabatan sebagai perdana menteri di Jamaika digambarkan sebagai tidak kompeten dan bodoh serta ragu tentang kemampuannya untuk memimpin. Politisi perempuan di Belgia juga memperoleh liputan dengan bias *gender*. Politisi dan kandidat perempuan digambarkan tidak kredibel dan diberikan ruang yang sedikit. Anggota parlemen perempuan secara signifikan diberikan waktu bicara yang lebih sedikit. Anggota parlemen yang berada di parlemen lebih disorot tentang isu-isu yang secara historis terkait dengan perempuan yang menekankan kepada stereotipe *gender* tradisional tanpa memedulikan posisi ideologis atau kebijakan yang dipegang dalam manifesto partai.

Di Brazil, peran tradisional gender dan dominasi laki-laki masih kuat. Hal ini ditunjukkan ketika seorang laki-laki dicalonkan untuk menjabat suatu jabatan, misalnya sebagai deputi federal, maka istrinya yang seorang politisi harus tinggal di rumah dan akan mengundurkan diri dari anggota parlemen. Namun jika sebaliknya, sang pria menjadi sangat kesal karena istrinya tidak ada untuk menyiapkan makan siang dan mengantar anak-anak ke sekolah, bahkan jika mereka memiliki pembantu. Di beberapa negara lain yang berada dalam negara *flawed democracy*, seperti di Indonesia politisi perempuan masih digambarkan sebagai sosok yang tergantung, emosional, lemah dan tidak berdaya. Citra politisi perempuan di media massa berada di wilayah domestik. Bahkan di Italia media massa juga menggunakan istilah-istilah yang secara umum dimaknai sebagai sesuatu yang merendahkan politisi perempuan. Hal berbeda terjadi di Korea Selatan, kecenderungan media massa terhadap pentingnya maskulinitas menyebabkan kandidat perempuan lebih cenderung digambarkan dengan cara yang tidak sesuai dengan stereotipe *gender*. Kandidat

perempuan digambarkan dengan bingkai yang lebih maskulin daripada pesaing laki-laki mereka.

c. Perspektif Gender di Negara *Hybrid Regime*

Negara *hybrid regime* adalah negara-negara yang terdapat tindak kecurangan dalam pemilu reguler serta keberadaan negara dirasa sedikit menghalangi rakyatnya untuk mendapatkan demokrasi yang adil dan bebas. Negara-negara ini umumnya mempunyai banyak masalah, seperti pemerintah yang memberikan tekanan kepada oposisi politik, peradilan yang tidak independen, korupsi yang merajalela, pelanggaran kebebasan pers dengan menekan dan menghambat para jurnalis, supremasi hukum yang lemah.

Ada beberapa negara yang masuk dalam tipe *hybrid regime*, yaitu Turki, Nigeria, Malawi dan Pakistan. Di dalam keempat negara tersebut, media massa memiliki kesamaan dalam membingkai politisi perempuan. Di Pakistan misalnya, keterlihatan laki-laki lebih tinggi dan mendominasi liputan media massa.

Gambaran politisi perempuan di Nigeria masih suram karena mereka dipinggirkan dengan hanya diberikan ruang yang sedikit dan digambarkan kurang kredibel. Mereka tidak terlihat sebagai subjek dan sumber berita sehingga tidak terlihat karena mereka dianggap tidak memenuhi persyaratan kelayakan untuk diberitakan dan hal itu menjadi indikasi bahwa politisi perempuan dianggap sebagai kandidat yang tidak layak.

Media massa di Turki menjadikan penampilan dan pakaian politisi perempuan sebagai topik umum dalam liputan. Di Malawi, media secara terus menerus mengawasi politisi perempuan dari sisi keeksentrikan dan kelemahan *gender*. Hal ini mampu secara efektif menghancurkan kesadaran kekuasaan politisi perempuan yang sedang menduduki jabatan pimpinan dan memicu persepsi misoginis, dan lebih dari itu, tidak ada perempuan yang cocok untuk posisi kepemimpinan.

d. Perspektif Gender di Negara *Authoritarian Regime*

Negara *authoritarian regime* adalah negara-negara yang di mana pluralisme politik tidak ada ataupun keberadaannya sangat terbatas. Negara-negara ini seringkali merupakan sebuah monarki absolut ataupun kediktatoran, yang mungkin memiliki beberapa lembaga demokrasi konvensional namun dengan sedikit intervensi di dalamnya. Pelanggaran dan penyalahgunaan kebebasan sipil, pemilihan umum (jika ada) yang tidak adil dan bebas, media massa yang ada sering kali dipegang oleh negara ataupun dikendalikan oleh kelompok-kelompok terkait dengan rezim yang

sedang berkuasa, independensi peradilan yang tidak terlaksana, penyensoran serta penindasan terhadap pengkritik pemerintah adalah hal yang lazim ditemukan.

Politisi perempuan di Afghanistan tidak dianggap serius, tetapi citra perempuan digambarkan secara positif jika berkaitan dengan kasus korupsi. Begitu juga politisi di Kamboja digambarkan sebagai lebih sedikit korupsi dan lebih bersedia mengambil sikap moral. Politisi perempuan dibingkai oleh media massa sebagai lebih mudah didekati dan inklusif. Di Sudan, politisi perempuan juga digambarkan media massa dengan lebih positif, mereka sering dibingkai untuk tujuan reformasi sebagai kelompok yang kalah jumlah dan kalah manuver.

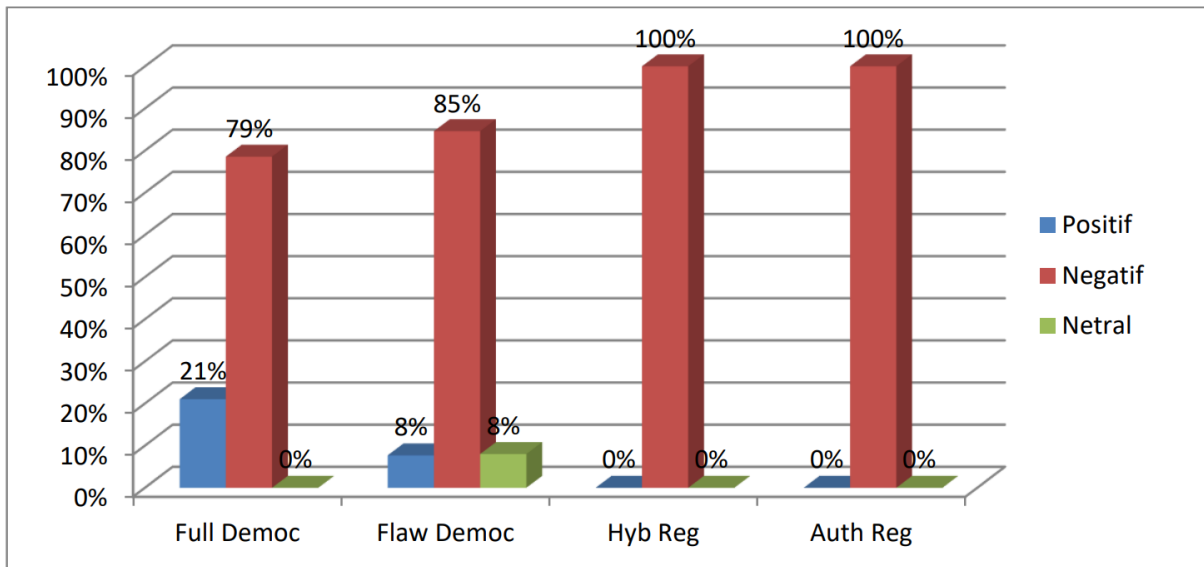
Di Kuwait, politisi perempuan diliput secara negatif dan ditampilkan sebagai tidak serius karena tekanan lobi islamis, wanita terjebak dan dilema karena mereka dikritik baik ketika mereka diam maupun ketika mereka angkat bicara.

Di China, politisi perempuan digambarkan dalam tiga lagu yang kemudian viral, yaitu “*Grass-Mud Horse*”, “*Green Dam Girl*”, dan “*My Elder Brother Works for SARFT*”. Ketiga lagu tersebut secara luas dirayakan sebagai penawaran terhadap potensi demokrasi dalam lingkungan politik, namun yang tidak disadari adalah bahwa ketiganya ternyata menyebarkan wacana dan gaya visual maskulin yang memposisikan tubuh perempuan dan feminin sebagai situs subordinasi, penetrasi, dan penghinaan. Batas-batas *gender* termanifestasi melalui pemaknaan yang terlihat dari misogini yang tertanam dalam lagu tersebut. Makna yang tersembunyi dari lagu tersebut dapat terlihat dengan analisis yang mendalam.

Di Mesir dan Tunisia, politisi perempuan hanya menyita perhatian media massa untuk diberitakan ketika berada dalam peristiwa spesifik seperti berada di dalam aksi demonstrasi besar, di luar itu politisi perempuan tidak bisa lebih terlihat. Begitu juga di Belarusia, politisi perempuan hanya mendapatkan ruang yang lebih sedikit. Sedangkan di Vietnam pemimpin perempuan kurang terwakili dan jarang muncul sebagai nara sumber di media massa.

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat dilihat perbedaan perspektif gender di negara dengan tipe *full democracy*, *flawed democracy*, *hybrid regime*, dan *authoritarian regime* pada grafik 1.1 berikut ini:

Grafik 1.1
Perbedaan Perspektif Gender di Negara Berdasarkan Tipe Rezim



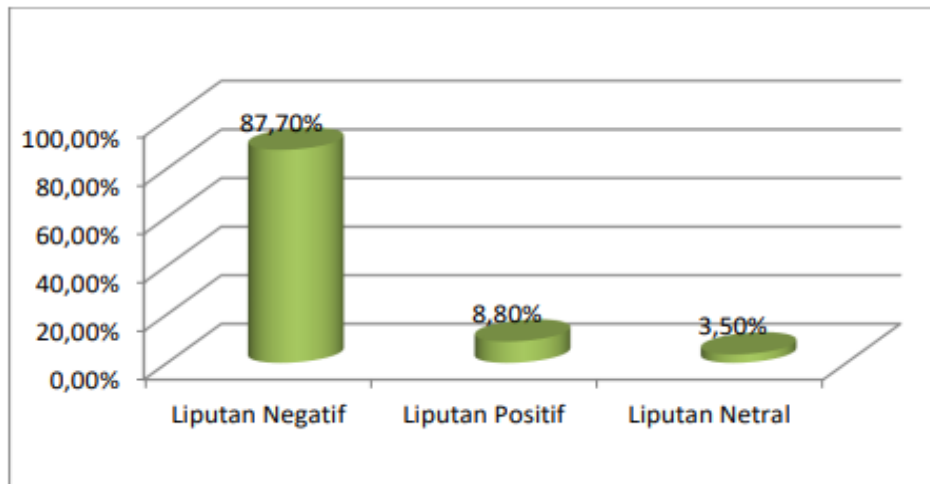
Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa liputan negatif terjadi di semua tipe negara, baik tipe *authoritarian regime*, *hybrid regime*, *full democracy*, maupun negara dengan *flawed democracy* dengan persentase yang berbeda. Namun yang membedakan adalah bahwa di dalam negara dengan tipe *full democracy* dan *flawed democracy* terdapat liputan positif terhadap politisi perempuan meskipun dengan persentase yang kecil, yaitu 21% di negara *full democracy* dan 8% di negara *flawed democracy*. Bahkan di negara *flawed democracy* terdapat liputan netral gender.

3. Perspektif Gender Politisi Perempuan di Media Massa

Dalam pemaparan data yang ditemukan pada penelitian, bias gender pada liputan media massa terbentuk dengan diskriminasi yang berbasis pada perbedaan kuantitatif dan kualitatif kemunculan politisi perempuan dan politisi laki-laki di media massa. Bias gender juga terlihat dalam bentuk dominasi (patriarki), objektifikasi, dan stereotipe *gender*. Ada dua bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh media terhadap politisi perempuan dalam liputannya, yaitu: dalam perspektif media politisi perempuan lebih sedikit diliput, kurang intens, dan tidak menjadi sumber dan subjek berita; dan media massa memotret perempuan dengan perspektif yang negatif.

Grafik 1.2.

Data Persentase Liputan Gender Politik Perempuan di Media Massa



Dalam grafik 1.2. menunjukkan bahwa politisi perempuan dipotret dengan negatif mencapai 87,70% sementara perspektif yang positif hanya 8,80% dan yang netral 3,50%. Realitas terjadinya diskriminasi dan bias *gender* yang dilakukan oleh media massa terhadap politisi perempuan tersebut tidak dapat dinilai sebagai sebuah peristiwa yang berdiri sendiri dan berjalan secara wajar begitu saja. Menurut kaum konstruksionis, realitas yang ada di media massa dalam bentuk berita atau liputan bukanlah realitas yang objektif, melainkan sebuah realitas yang telah dikonstruksi oleh wartawan atau lembaga media itu sendiri. Berita dalam media massa tidak bisa disamakan dengan fotokopi dari realitas, tetapi harus dipandang sebagai hasil konstruksi dari realitas.

Dari aspek media, ada beberapa alasan kenapa media massa menggambarkan politisi perempuan dengan realitas yang negatif, yaitu: *pertama*, menurut Kaul ketika media meliput perempuan dalam bias yang kemudian berdampak pada citra buruk dan menghambat perkembangan mereka di masyarakat adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat (Kaul, 2012). Hal ini yang menjadikan liputan bias *gender* terhadap politisi perempuan terjadi secara berkelanjutan. Semakin suatu peristiwa memenuhi kondisi tertentu, maka semakin mudah untuk dipilih sebagai item berita (Jorge, 2008).

Kedua, Norris menggunakan konsep "*gender framework*" untuk mengilustrasikan bagaimana jurnalis menggunakan konteks konvensional untuk menyederhanakan, memprioritaskan, dan menyusun alur narasi peristiwa ketika meliput perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik (Norris, 1997). Menurut Kraus dan Davis media menggunakan beberapa cara untuk mengkonstruksikan realitas politik, yaitu: pencitraan; pembuatan realitas komunikasi; penganugerahan status; pembuatan peristiwa buatan; dan agenda setting (Hamad, 2004). Kelima cara ini bukan sekedar berpengaruh terhadap citra para aktor

politik namun juga memengaruhi perilaku politik para aktor dan khalayak. Lebih lugas, dengan merujuk kepada pendapat McNair, dapat dikatakan bahwa media massa, dalam mengkonstruksi politisi perempuan, mengambil peran sebagai *intensifier* di mana media mampu memunculkan isu dan mempertajamnya, dan peran sebagai *conflict diminisher* di mana media menenggelamkan suatu isu dengan secara sengaja meniadakan isu (McNair, 1995). Namun sayangnya, peran-peran yang dimainkan oleh media massa tersebut bukan membantu tercapainya kesetaraan *gender* dalam ranah politik, bahkan justru memberikan gambaran secara negatif yang merugikan politisi perempuan.

Ketiga, konstruksi realitas politisi perempuan dalam perspektif negatif sangat mungkin berkaitan dengan jumlah dan komposisi perempuan dalam industri media. Sebagai gambaran dalam wilayah yang kecil, di Indonesia misalnya. Menurut Luviana jumlah jurnalis perempuan di Indonesia masih jauh dibandingkan jurnalis laki-laki, yaitu hanya sekitar 1:3 atau 1:4. Walaupun mereka telah mendapatkan berbagai pelatihan jurnalistik, namun hanya 17,46% jurnalis perempuan yang mendapatkan pelatihan *gender*. Data juga menunjukkan hanya sekitar 33% jurnalis perempuan yang masuk di organisasi wartawan, dan hanya 6% jurnalis perempuan yang menduduki posisi sebagai redaktur maupun pengambil keputusan di redaksi. Kondisi di atas juga dialami oleh jurnalis perempuan di 99 organisasi media utama di 27 negara Uni Eropa (Luviana, 2012).

Keempat, media massa sengaja membungkam dan menghilangkan suara perempuan dari kehidupan publik serta penindasan mereka di ruang privat dengan cara mengabaikan perempuan sebagai subjek dan sumber berita, serta merendahkan atau meremehkan kontribusi politik mereka, dengan cara penghilangan atau tidak diadakannya perempuan dalam berita (*omission*), pengabaian media terhadap perempuan sehingga tidak ditayangkan dalam berita (*trivialization*), dan penyalahan media terhadap perempuan (*condemnation*). Cara media massa tersebut disebut oleh Gaye Tuchman sebagai *symbolic annihilation* (pemusnahan simbolik) (Susan, 2002).

Tidak mengherankan jika kemudian media massa menggambarkan politisi perempuan sebagai tidak berdaya, penurut, emosional, membutuhkan bantuan laki-laki dan terfokus pada peran tradisional mereka di keluarga sebagai ibu, istri, atau anak perempuan, bukan pada kompetensi mereka tanpa peduli dengan posisi ideologis. Dengan karakter yang demikian mereka dianggap tidak layak, tidak hanya di dalam persaingan politik, apalagi sebagai pimpinan politik, bahkan mereka juga dianggap tidak layak untuk diberitakan.

Namun keberpihakan media terhadap dominasi politisi laki-laki tersebut tidak selalu dilakukan dengan terang-terangan. Menurut Conway media massa tidak selalu menyajikan

laporan berita yang bias *gender* tersebut secara terang-terangan, tetapi juga dilakukan dengan implisit sehingga tidak disadari oleh khalayak namun mampu memengaruhi cara berfikir mereka. Media massa tidak hanya melakukannya dalam basis materi budaya tetapi juga kadang-kadang menggunakan imajiner seniman kreatif dan juga penggunaan bahasa dan simbol lainnya. Beberapa media massa mengobjekkan politisi perempuan menjadi karikatur editorial yang digunakan oleh media massa untuk menggambarkan kekurangan pada penampilan dan karakter politisi perempuan. Begitu juga adanya media massa yang menggunakan termonologi khusus untuk membedakan politisi berdasarkan gender, seperti di Italia digunakan penyebutan *ministra/e* khusus untuk perdana menteri perempuan. Begitu juga ketika fashion dari politisi perempuan dijadikan fokus liputan oleh media massa, maka sebenarnya telah terjadi bias *gender* dalam liputan media tersebut. Fashion secara umum dipahami sebagai simbol *gender* perempuan (Conway: 1987).

4. Perspektif Gender Berdasarkan Tipe Rezim

Pada grafik 1.1. perspektif *gender* politisi perempuan di negara dengan tipe *full democracy*, *flawed democracy*, *hybrid regime*, dan *authoritarian regime* adalah sama, mereka dipotret oleh media massa dengan perspektif negatif. Perspektif negatif *gender* terjadi di 79% negara *full democracy*, 85% negara *flawed democracy*, 100% negara *hybrid regime* dan *authoritarian regime*. Namun yang membedakan adalah bahwa di dalam negara dengan tipe *full democracy* dan *flawed democracy* terdapat liputan yang positif terhadap politisi perempuan meskipun dengan persentase yang kecil, yaitu 21% dan 8%, serta 8% negara dengan tipe *hybrid regime* ada liputan positif terhadap politisi perempuan.

a. Perspektif Gender di Negara *Full Democracy*

Dibandingkan dengan negara dengan tiga tipe yang berbeda, negara *full democracy* memiliki persentase negara terkecil yang memotret politisi perempuan dalam perspektif *gender* negatif, meskipun angkanya masih tinggi, yaitu 79% dan negara dengan persentase liputan positif terbanyak, meskipun angkanya masih kecil yaitu 8%.

Dalam penelitian yang dilakukan di United Kingdom (UK), salah satu negara *full democracy*, menyebutkan bahwa jurnalisme lokal memiliki peran kunci dalam masyarakat sipil. Kemerosotan industri surat kabar lokal, dan dampak negatif yang ditimbulkan pada jurnalisme, mengurangi pengawasan fungsi demokrasi. Ada kesepakatan umum bahwa demokrasi hanya dapat berfungsi secara efektif di mana publik memiliki akses ke informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sipil. Oleh karena itu, kehadiran jurnalisme dalam masyarakat sipil sangat penting untuk berfungsi dengan baik. Karena ada pengurangan kapasitas berita maka cenderung merusak, dan jika jurnalisme

tidak ada maka berpotensi menjadi bencana. Dampak pada masyarakat dengan penghapusan atau pengurangan liputan surat kabar lokal bisa sangat besar. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa respon strategis yang dihasilkan terhadap penurunan komersial oleh industri surat kabar lokal memiliki efek yang merugikan, terutama di daerah pedesaan (Tony, 2020).

Pada penelitian di Kanada, negara *full democracy* lainnya, menunjukkan bahwa media lokal melakukan berbagai fungsi dalam masyarakat Kanada. Mereka melakukan peran sipil yang mendasar dengan menyediakan informasi yang dapat diandalkan, tepat waktu, dan tidak memihak tentang urusan masyarakat. Mereka memastikan lembaga publik dan swasta dimintai pertanggungjawaban. Media juga mencerminkan keragaman dan dapat menumbuhkan integrasi dan kohesi sosial di antara berbagai elemen masyarakat. Media etnis di Kanada dapat dilihat sebagai sebuah ilustrasi yang baik dari peran ini. Mereka membangun jembatan antar budaya dan mendukung integrasi pendatang baru. Media yang melayani komunitas minoritas bahasa resmi memainkan peran yang sama. Mereka mendukung perkembangan dan vitalitas komunitas bahasa minoritas dan membantu membawa mereka keluar dari keterasingan. Pemerintah juga menggunakan cabang media ini untuk berkomunikasi dengan publik dalam kedua bahasa resmi. Media memainkan peran penting dalam demokrasi yang sehat (Hedy, 2017).

Penelitian di atas tidak konsisten dengan hasil temuan peneliti yang menunjukkan bahwa justru media massa meliput politisi perempuan dengan menggunakan isu rasisme yang kuat terhadap politisi perempuan dengan kulit berwarna. Memang media massa di Kanada tidak selalu memberikan perhatian lebih kepada tubuh politisi perempuan dibandingkan dengan politisi laki-laki, tetapi media massa memberikan perhatian lebih kepada politisi berdasarkan warna kulit.

Di negara *full democracy*, media massa cenderung berfungsi dengan baik, memiliki kebebasan untuk membuat liputan berita. Pengurangan kapasitas berita dianggap sebagai sesuatu yang merusak dan jurnalisme yang tidak berfungsi dengan baik dianggap sebagai sebuah bencana. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan belum disetarakan dengan laki-laki kendatipun ada regulasi yang melarang perilaku diskriminatif tersebut. Perempuan masih diperlakukan dengan diskriminatif. Pengaruh pemikiran tradisional masih berpengaruh di tengah masyarakat sehingga menyulitkan perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Fungsi media massa yang sudah baik di negara *full democracy* dibebani oleh pemikiran tradisional tentang perempuan yang kurang mendukung

menjadikan media massa masih menggambarkan politisi perempuan sesuai dengan pandangan umum tradisional masyarakat terhadap perempuan.

b. Perspektif Gender di Negara *Flawed Democracy*

Potret politisi perempuan di negara *flawed democracy* agak berbeda dengan di negara dengan tipe *authoritarian regime* dan *hybrid regime*. Media massa di 8% negara *flawed democracy* masih meliput dengan perspektif positif terhadap perempuan dan 8% lainnya netral. Hal yang tidak terjadi di *authoritarian regime* dan *hybrid regime*.

Perkembangan media massa saat ini di negara *flawed democracy* dapat dikelompokkan ke dalam dua karakteristik, yaitu: *pertama*, konglomerasi media (sebagai lawan dari keragaman dan pluralitas), integrasi dengan elit kekuasaan lainnya (sebagai lawan dari kemerdekaan). Media massa dimiliki dan dikendalikan oleh konglomerat dan sekaligus sebagai politikus yang cenderung terintegrasi dengan elit kekuasaan.

Kedua, media massa yang masih menghadapi regulasi yang ketat dengan masih banyaknya sensor oleh kekuasaan. Kedua karakteristik tersebut menjadikan media tidak mampu untuk membuat liputan dalam perspektif yang objektif sebagai sumber informasi publik yang kredibel. Liputan media sudah terkontaminasi dengan subjektivitas pemilik yang juga politikus atau kekuasaan yang berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kedua karakteristik tersebut dapat menjadi alasan liputan negatif terhadap politisi perempuan, karena pada kenyataannya pada penelitian ini terdapat 85% negara *flawed democracy* yang medianya melihat politisi perempuan dalam perspektif gender yang negatif.

Media massa di Malaysia, negara *flawed democracy* lainnya, berbeda dengan media massa di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Malaysia, sensor sering diterima karena alasan budaya, juga oleh jurnalis. Undang-undang media yang ketat menyulitkan mereka untuk secara terbuka menentang sensor. Ini mungkin menjadi alasan mengapa jurnalis harus menyembunyikan konten sensitif di dalam artikel yang tampaknya lebih sesuai, dan membiarkan pembaca membaca yang tersirat. Kondisi yang terjadi di Malaysia ini juga ditemukan di Singapura. Para jurnalis di Singapura menyembunyikan pesan dalam artikel mereka, yang disebut oleh B.N. Balji, seorang jurnalis media online *The Independent*, sebagai “permata tersembunyi” (Hem, 2014).

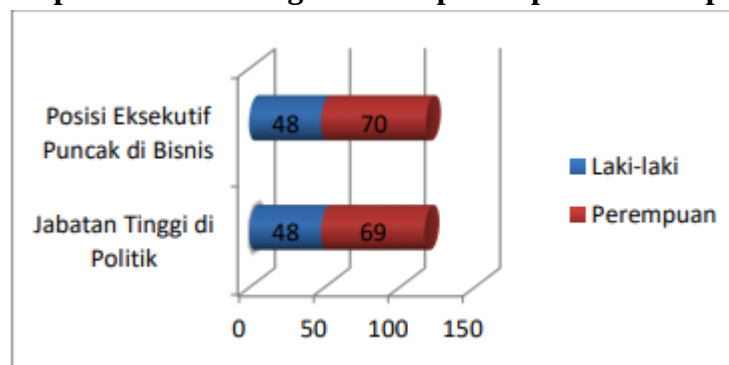
Lanskap industri media Indonesia sangat dinamis. Media terus menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan perkembangan industri media selalu vital bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan media di Indonesia semakin dekat dan kebijakan

baru perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa industri media memprioritaskan layanannya demi kepentingan publik, bukan demi kepentingan bisnis (Vidi, 2019).

Perkembangan pers di Indonesia sepertinya akan menuju titik seperti yang terjadi di Amerika saat ini. Dalam penelitian Akhavan terhadap pers di Amerika, juga salah satu negara *flawed democracy*, menunjukkan bukti matinya Libertarianisme dalam sistem media massa Amerika dan mengusulkan model “elite power group” sebagai alternatif penjelasan cara kerja media massa di Amerika Serikat.

Diskriminasi *gender* di Amerika tidak hanya terjadi di dalam media tetapi juga di dalam jabatan-jabatan politik dan eksekutif puncak di bidang bisnis, perempuan diperlakukan secara diskriminatif. Masyarakat Amerika memandang bahwa jumlah perempuan yang berada di dalam kepemimpinan masih terlalu sedikit dan mereka memandang bahwa hal itu disebabkan oleh diskriminasi gender, seperti terlihat di dalam grafik 1.3. di bawah ini:

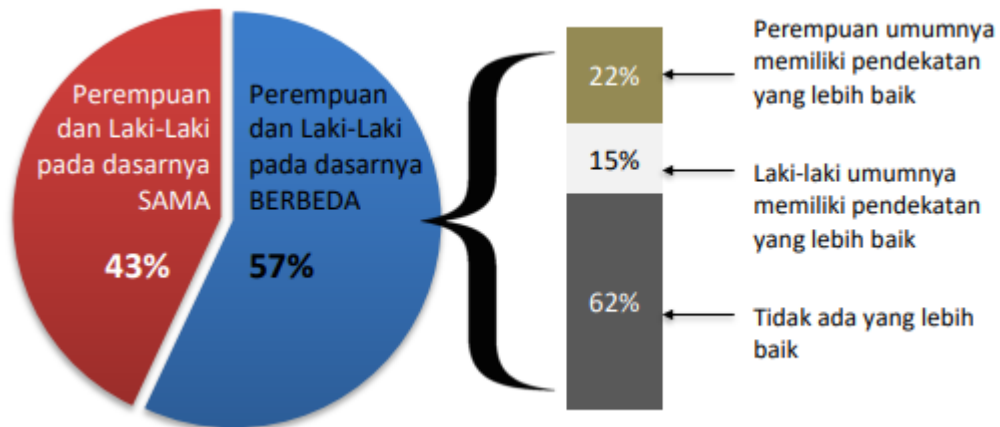
Grafik 1.3.
Persepsi Publik tentang Posisi Kepemimpinan Perempuan



Sumber: <https://www.pewresearch.org/social-trends/2018/09/20/women-and-leadership-2018>

Data pada grafik 1.3. di atas menunjukkan kesenjangan *gender* yang lebar dalam pandangan tentang perempuan dalam kepemimpinan. Sekitar tujuh dari sepuluh wanita mengatakan terlalu sedikit wanita yang menduduki jabatan tinggi dalam politik dan posisi eksekutif puncak di bidang bisnis, sekitar setengah dari pria mengatakan hal yang sama. Perempuan jauh lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk melihat hambatan struktural dan harapan yang tidak merata menahan perempuan dari posisi ini.

Grafik 1.4.
Persepsi Masyarakat Amerika tentang Gaya Kepemimpinan Pria dan Perempuan



Sumber: <https://www.pewresearch.org/social-trends/2018/09/20/women-and-leadership-2018>

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang Amerika melihat laki-laki dan perempuan sama-sama mampu dalam hal beberapa kualitas dan perilaku utama yang penting untuk kepemimpinan, bahkan ketika mayoritas (57%) mengatakan laki-laki dan perempuan di posisi teratas dalam bisnis dan politik cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Di antara mereka yang mengatakan laki-laki dan perempuan mendekati kepemimpinan secara berbeda, 62% mengatakan keduanya tidak lebih baik, sementara 22% mengatakan perempuan umumnya memiliki pendekatan yang lebih baik dan 15% mengatakan laki-laki yang memiliki pendekatan lebih baik.

Penggambaran terhadap politisi perempuan di media merupakan refleksi dari cermin budaya masyarakat dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Di dalam masyarakat yang masih menerapkan diskriminasi terhadap perempuan, maka hal yang sama juga dilakukan oleh media. Diskriminasi yang terjadi di masyarakat dan kemudian dimediasi oleh media massa menyebabkan masih kurangnya persentasi keterwakilan perempuan di dalam kepemimpinan politik meskipun secara agregat terjadi pertumbuhan.

c. Perspektif Gender di Negara *Hybrid Regime*

Penggambaran media massa terhadap politisi perempuan di negara dengan *tipe hybrid regime* sama dengan di negara dengan *tipe authoritarian regime*, yaitu keseluruhan memberikan gambaran yang negatif. Magdalena dalam penelitiannya ingin mencari hubungan dinamis antara media hibrida dan politik hibrida, dengan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada strategi rezim untuk membatasi dan memanipulasi debat publik. Dalam negara *hybrid regime* terjadi ambiguitas politik hibrida, yang menggabungkan elemen demokratis dan otoriter, hal ini tidak hanya membatasi pelaporan independen dan kritis, tetapi juga membuka peluang bagi lembaga jurnalistik.

Sehingga dalam negara *hybrid regime* ada ketidakpastian informasi dan strategi aktor politik untuk mengontrol pengetahuan publik (Magdalena, 2019).

Magdalena menemukan bahwa lingkungan media hibrid baru secara signifikan meningkatkan volatilitas politik hibrid dan ketidakpastian informasi bagi aktor politik. Strategi yang digunakan oleh jurnalis adalah dengan memanfaatkan kontradiksi internal politik hibrida untuk mengejar agenda mereka sendiri. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan pembatasan dan agensi jurnalistik seperti ketergantungan klientelistik, sumber daya ekonomi, dan aliansi masyarakat sipil. Hibriditas media mencakup berbagai wajah dari apa yang dimaksud dengan media, yaitu institusi sosial, produk budaya, teknologi, dan lain-lain. Tiga dimensi hibriditas media memiliki relevansi khusus dalam konteks masa kini. Masing-masing memengaruhi praktik jurnalistik dan dampaknya pada tingkat dan distribusi ketidakpastian informasi dalam rezim hibrida (Katrin, 2021).

Chadwick mengambil pendekatan yang sangat berbeda tentang sistem media hibrida. Chadwick mengembangkan teori hibriditasnya dari perspektif teknologi. Dia berpendapat bahwa dalam sistem media hibrida baru, perbedaan antara media lama dan baru menjadi tidak berarti, karena media *online* dan *offline*, media tradisional dan digital bertemu ke dalam lingkup konstruksi makna yang sebagian besar tumpang tindih di mana pesan diproduksi dan dikendalikan oleh semakin banyak *gatekeeper profesional* dan *nonprofessional*. Akibatnya, sistem media hibrida yang muncul menghadirkan kumpulan logika media yang berbeda, sehingga menciptakan ekologi media baru yang menggabungkan aktor baru, praktik produksi pesan baru, dan jalan baru arus informasi di luar elit-sistem dominasi media massa tradisional, yang telah menjadi landasan kontrol informasi dalam rezim otoriter tradisional (Chadwick, 2017).

Secara keseluruhan ada kecenderungan bahwa negara *hybrid regime* yang menuju demokratisasi dapat dikatakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Sisi positifnya, bahkan proses demokratisasi yang belum selesai telah membuka peluang baru bagi partisipasi dan pergantian kekuasaan melalui lembaga formal. Ini telah membantu melembagakan perubahan kepemimpinan yang di bawah rezim otoriter hal itu merupakan tantangan yang serius. Namun demikian karakter rezim otoriter masih terus melekat, misalnya secara khusus, harapan yang sangat sulit dipenuhi, dan sistem klientelistik berlanjut atau bahkan meningkat di mana potensi kontrol *top-down* yang otoriter tidak digantikan oleh *checks and balances* dan akuntabilitas yang efektif kepada warga negara (Nicolas, 2001).

Di Nigeria, salah satu negara dengan tipe *hybrid regime*, kewenangan direduksi menjadi sekedar kafir dan warga negara kelas dua, oleh karena itu, ada kesamaan sistem kepercayaan

umum bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di dapur. Tren ini telah membawa gambaran keliru yang luar biasa terhadap perempuan di tingkat keluarga hingga masyarakat umum. Masyarakat Nigeria bersifat patriarki yang merupakan ciri utama masyarakat tradisional. Ini adalah struktur dari seperangkat hubungan sosial dengan basis material yang memungkinkan laki-laki mendominasi perempuan. Oleh karena itu, perempuan didiskriminasi, dalam banyak kasus, memperoleh pendidikan formal, diperlakukan dengan buruk dan terus-menerus dipelihara sebagai pembantu rumah tangga. Rata-rata wanita Nigeria dipandang sebagai objek yang tersedia untuk pelacuran, pernikahan paksa, alat pedagang kaki lima dari perdagangan luas dan ketidakcocokan dalam masyarakat. Status perempuan dalam masyarakat direduksi sebagai komoditas yang rendah.

Penelitian yang menggunakan pendekatan historis ini menemukan bahwa jika konsep demokrasi memungkinkan keragaman pendapat dan partisipasi kelompok yang berbeda, maka hal yang sama tidak dapat bertahan dengan mengecualikan perempuan, yang secara efektif merupakan setengah dari populasi dunia. Oleh karena itu semua bentuk diskriminasi yang tidak manusiawi dan ketidaksetaraan *gender* harus ditentang dan perlunya pendekatan yang disengaja, sensitif, konsisten dan sistematis yang mencakup pengarusutamaan *gender* dalam semua aspek kehidupan.

Dalam penelitian lain di Turki, negara dengan tipe *hybrid regime*. Penelitian ini menemukan bahwa orang Turki pada umumnya memiliki pandangan yang tradisional tentang perempuan yang disebut sebagai *attitude toward women* (ATW). Menurut mereka, di Turki, ATW tersebut pada dasarnya adalah konstruksi masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa budaya berdampak pada ATW masyarakat. Dampak tersebut berbeda dari satu aspek budaya ke aspek lainnya. Hal itu terjadi pada dasarnya disebabkan oleh kolektivisme vertikal (penekanan pada hirarki dan ketidaksetaraan dalam masyarakat) dan, pada tingkat yang lebih terbatas, individualisme horizontal (memandang diri sendiri setara dengan orang lain). Sikap negatif terhadap perempuan terjadi karena kombinasi jenis kelamin, kolektivisme vertikal ditambah dengan konservatisme. (Bugay, 2019)

d. Perspektif Gender di Negara *Authoritarian Regime*

Dalam penelitian ini seluruh negara dengan tipe *authoritarian regime* memberikan liputan yang negatif kepada politisi perempuan. Salah satu perbedaan yang menonjol antara negara demokrasi dan non demokrasi adalah pada bagaimana media massa diperlakukan. Demokrasi yang tidak berfungsi di dalam suatu negara tidak akan memberikan kebebasan kepada pers dan cenderung akan melakukan menyensoran. Di Venezuela misalnya

masyarakat mengklaim bahwa situasi menjadi lebih buruk bagi jurnalis setelah Nicolás Maduro menjadi presiden pada 2013 (Hem, 2014).

Di dalam negara *authoritarian regime* media massa dikontrol oleh rezim yang disebut sebagai media rezim. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Magdalena di Iran, salah satu negara tipe *authoritarian regime*, tentang bagaimana masyarakat di negara tersebut menggunakan media. Penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas muslim lebih banyak menggunakan media rezim dan kurang menggunakan media nonrezim. Sedangkan masyarakat nonreligius menggunakan kedua tipe media, yaitu media rezim dan media nonrezim. Ditemukan juga bahwa perempuan lebih besar kemungkinan menggunakan media rezim daripada laki-laki. Demikian juga orang-orang di daerah nonperkotaan memiliki kemungkinan menggunakan media rezim tiga kali lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan. Bahkan kelompok pro-demokrasi sekalipun, tidak secara jelas melakukan seleksi untuk tidak menggunakan media rezim sebagai sumber informasi (Magdalena, 2019).

Di negara *authoritarian regime* lainnya, seperti Venezuela, memiliki kondisi terburuk bagi jurnalis. Bahkan dua orang yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian di sana ingin ditampilkan sebagai anonim. Venezuela adalah republik dengan struktur pemerintahan terpusat, di mana pemerintah telah mengambil kendali atas sebagian besar media. Kondisi sulit bagi jurnalisme independen dan ketakutan akan pembalasan dari pemerintah menjelaskan mengapa orang Venezuela mengoperasikan media dari luar negeri dan mengirim cerita ke surat kabar di negara lain daripada menerbitkannya di dalam negeri (Hem, 2014).

Di dalam negara dengan tipe *authoritarian regime*, media massa dikontrol dan diawasi oleh negara, apalagi jika media tersebut disebut sebagai media rezim, maka dipastikan bahwa media massa diperankan sebagai alat untuk menyuarakan pandangan pemerintah, termasuk yang berhubungan dengan isu perempuan. Dengan demikian maka penggambaran dan perlakuan media massa yang negatif terhadap politisi perempuan adalah juga merupakan pandangan yang memang diinginkan oleh rezim yang berkuasa. Cara media menggambarkan politisi perempuan di negara *authoritarian regime* tidak terlepas dari budaya negara tersebut dalam memperlakukan perempuan dalam bias *gender*. Temuan empiris komparatif di rezim Aljazair dan Mozambik menunjukkan bahwa terlepas dari perbedaan ekonomi, agama, dan etnis dari masyarakat yang mereka kelola, mereka telah menerapkan strategi yang sama di bidang politik *gender* untuk memperkuat kekuasaan mereka atas masyarakat. Ada tiga pola umum yang mereka lakukan, yaitu: *pertama*, kedua

rezim telah menggunakan politik *gender* dan realisasi parsial hak-hak perempuan sebagai strategi legitimasi otoriter; *kedua*, baik rezim Aljazair maupun rezim Mozambik telah menggunakan organisasi perempuan sebagai mekanisme kooptasi; dan *ketiga*, kedua rezim otoriter tersebut telah mengesahkan dan mempertahankan undang-undang yang menetapkan dualitas terkait status perempuan dengan mempromosikan keterwakilan perempuan di ruang publik sementara, pada saat yang sama, membatasi hak-hak mereka di ruang privat (Jasmin, 2016: 32-33).

Menariknya, bagaimanapun, kecenderungan yang sangat mirip juga dapat diamati dalam kasus Mozambik, di mana Islam politik atau kecenderungan Islam ortodoks sejauh ini tidak memainkan peran penting. Rezim satu partai sosialis serta, kemudian rezim otoriter yang diliberalisasi di Mozambik telah menggunakan divisi sosial dan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini juga berlaku untuk politik gender. Segera setelah kemerdekaan, rezim sosialis Frelimo menggunakan promosi hak-hak perempuan sebagai bagian dari upayanya untuk membentuk sistem yang dinamakan pria baru, sebuah strategi yang juga ditujukan untuk melemahkan kekuatan otoritas sosial tradisional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, rezim sebagian besar menggunakan strategi akomodasi politik *vis-à-vis* otoritas tradisional untuk mendapatkan dukungan mereka dalam menentang oposisi politik dan mengadopsi kebijakan toleransi terhadap budaya yang sangat patriarki.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis meta yang dilakukan terhadap data terkait dengan perspektif media massa terhadap politisi perempuan, maka peneliti menyampaikan kesimpulan sebagai temuan di dalam penelitian sebagai berikut:

1. *Pertama*, politisi perempuan ditampilkan oleh media massa tradisional dan online dalam perspektif *gender* yang negatif secara kuantitas dan kualitas yang dikemas dalam tiga kategori patriarki, objektifikasi dan stereotip. Tampilan negatif politisi perempuan dalam kategori patriarki lebih banyak digunakan oleh media massa dibandingkan kategori lainnya, hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa perempuan sudah lebih banyak mengambil peran-peran dalam struktur sosial terutama politik. *Kedua*, media massa melemahkan politisi perempuan dengan mengkombinasikan isu *gender* dengan isu ras daripada memilih kombinasi isu *gender* dengan ideologi secara simultan dalam liputannya. Kombinasi isu *gender* dengan ras potensial berdampak lebih negatif terhadap politisi perempuan, sedangkan kombinasi isu *gender* dengan ideologi potensial berdampak positif. Dengan demikian media massa bukan bagian dari gerakan

pengarusutamaan *gender*. *Ketiga*, penampilan perempuan dalam perspektif negatif di media massa merupakan bentuk kegagalan gerakan feminisme untuk mengantarkan perempuan dalam jabatan politik dengan pendekatan *status quo*.

2. Potret politisi perempuan di negara *full democracy*, *flawed democracy*, *hybrid regime*, dan *authoritarian regime* ditampilkan oleh media masa dalam perspektif yang dominan negatif dengan persentase yang berbeda. Di negara *full democaracy* perspektif negatif politisi perempuan di media massa lebih rendah dibandingkan dengan di tipe negara lainnya, disusun secara berurutan di negara *flawed democracy*, negara *hybrid regime*, dan perspektif *gender* paling negatif terjadi di negara *authoritarian regime*. Sebagian kecil negara *full democracy* dan *flawed democracy* politisi perempuan diptoret dalam perspektif yang positif tetapi hal itu tidak terjadi di negara dengan tipe *hybrid regime* dan *authoritarian regime*. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan oleh perbedaan karakteristik media massa dan budaya di masing-masing tipe negara. Dalam negara *full democracy*, media massa dipengaruhi oleh ideologi politik ekonomi, sedangkan di sebagian negara dengan tipe *flawed democracy*, selain dipengaruhi oleh ideologi politik ekonomi, juga masih dipengaruhi oleh regulasi yang ketat serta pandangan umum tradisonal masyarakat perempuan. Sedangkan di negara *hybrid regime* dan *authoritarian regime*, suara media massa adalah suara rezim yang cenderung memperlakukan perempuan dalam bias *gender* untuk mempertahankan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2015). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Rabawiyah*, 12(01).
- Badran, M. (2009). *Feminism in Islam: secular and religious convergences*. Oxford: Oneworld Press
- Bugay, A., Delevi, R., & Mullet, E. (2019). Attitude toward women in Turkey: Combined effect of sex, place, and culture. *Current Psychology*, 40(7).
- Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power*. New York: Oxford University Press.
- Conway, J. K. (1987). The Concept of Gender. *Daedalus*, 116(4).
- Cuklanz, L. (2016). *Feminist Theory in Communication*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Dow, B. J., & Condit, C. M. (2005). The state of the art in feminist scholarship in communication. *Journal of Communication*, 55(3).

- Eriyanto, & Mulyana, D. (2002). *Analisis Framing Konstruksi Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Efendy, R. (2014). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan. *Al-Maiyyah*, 7(2).
- Faludi, S. (1992). Backlash: The Undeclared War Against American Women. *Psychology of Women Quarterly*, 16(3).
- Fauzi, A. C. (2007). *Kabar-kabar Kekerasan dari Bali*. Yogyakarta: LKiS.
- Fountaine, S., & McGregor, J. (2002). Reconstructing gender for the 21 st century : News media framing of political women in New Zealand. *Australian New Zelandad Communication Association Annual Conference*.
- Fry, H. (2017). *Disruption: Change and churning in Canada's media landscape*. Canada: House of Commons Chambre Des Communes.
- Hamad, I. (2004). Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999). *Makara, Sosial Humaniora*, 8(1).
- Hem, M. (2014). Evading the censors: Critical journalism in authoritarian states. *Reuters Institute Fellowship Paper University of Oxford*.
- Huddy, L., & Terkildsen, N. (1993). Gender Stereotypes and the Perception of Male and Female Candidates. *American Journal of Political Science*, 37(1).
- Jorge, T. D. M. (2008). News values in news websites: An empirical study of the criteria of newsworthiness in Argentina and Brazil. *Brazilian Journalism Research*, 4(1).
- Kaul, V. (2007). Globalization and Gender Issue. *Malaysian Journal of Communication*, 28(2).
- Kholill, S., & Dalimunthe, Maulana Andinata. (2015). *Isu-Isu Komunikasi Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing.
- King, D. C., & Matland, R. E. (2003). Sex and the grand old party: An Experimental Investigation of the Effect of Candidate Sex on Support for a Republican Candidate. *American Politics Research*, 31(6).
- King, U. (2013). Review of Pamela Sue Anderson, ed., *New Topics in Feminist Philosophy of Religion: Contestations and Transcendence Incarnate* (Feminist Philosophy Collection), Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer 2010. *Religion and Gender*, 3(1).
- Lavender, T. (2020). *Research into recent dynamics of the press sector in the UK and globally*. London: Plum Consulting.
- Lorch, J., & Bunk, B. (2016). *Gender Politics, Authoritarian Regime Resilience, and the Role of Civil Society in Algeria and Mozambique*. German: Giga Working Papers.
- Luviana. (2012). *Jejak Jurnalis Perempuan*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Marhumah, E. (2011). *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- McNair, B. (1995). *an Introduction to Political Communication*. London: Routledge
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka WCC & Pustaka Pelajar.
- Muqoyyidin, A.W. (2013). WACANA KESETARAAN GENDER: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2).

- Nisa, N.C. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender Dan Anak (Psga) Uin Syarif Hidayatullah. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Norris, P. (1997). *Women, Media and Politics*. New York: Oxford University Press.
- Pankaj Kumar. (2017). Participation of Women in Politics : Worldwide experience. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(12).
- Parman, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(02).
- Rusydiyah, E.F. (2016). PENDIDIKAN ISLAM DAN KESETARAAN GENDER (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga). *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel*.
- Solichin, M.M. (2006). Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan Gender. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2).
- Sukmayadi, V. (2019). The Dynamics of Media Landscape and Media Policy in Indonesia. *Asia Pacific Media Educator*, 29(1).
- Voltmer, K., Selvik, K., & Høigilt, J. (2021). Hybrid Media and Hybrid Politics: Contesting Informational Uncertainty in Lebanon and Tunisia. *International Journal of Press/ Politics*, 26(4)s.
- Walle, N. Van de. (2001). *African Economies and the Politics of Permanent Crisis 1979-1999*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wojcieszak, M. (2019). What Drives Media Use in Authoritarian Regimes? Extending Selective Exposure Theory to Iran. *The International Journal of Press/ Politics*, 24(1).